



### Review Pendapatan Asli Daerah: Pendekatan Analisis Horisontal Dan Vertikal

*Review of Local Original Income: Approach To Horizontal And Vertical Analysis*

Syamsul<sup>1)</sup> Lilia Fifiani<sup>2)</sup>

STIE Panca Bhakti Palu<sup>1,2)</sup>

email: [fjrafandi@gmail.com](mailto:fjrafandi@gmail.com)<sup>1)</sup> [lilia.fifiani@gmail.com](mailto:lilia.fifiani@gmail.com)<sup>2)</sup>

Disubmit: 8 Mei 2019; Direvisi: 18 Juni 2019; Dipublish: 1 Oktober 2019

#### Abstract

*This study aims to evaluate the Local Original Revenue (PAD) using a horizontal and vertical analysis approach. This type of research is descriptive qualitative research. The data analyzed are the PAD data of the Parigi Moutong Government for the period 2013-2017. The results of the analysis show that the average growth of the PAD component is 61.19% and the majority of the contribution rate of each PAD component is <30%. This research contributes as an additional reference for policymakers in the future management of PAD in Parigi Moutong Government. Furthermore, this research can be used as an additional reference for further research related to the same topic as this research*

**Keywords:** *Local Original Revenue; Horizontal and Vertical Analysis*

#### Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggunakan pendekatan analisis horisontal dan analisis vertikal. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Data yang dianalisis adalah data PAD Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong periode tahun 2013-2017. Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan komponen PAD sebesar 61,19% dan mayoritas tingkat kontribusi masing-masing komponen PAD < 30%. Artikel ini berkontribusi sebagai referensi tambahan bagi pengambil kebijakan dalam rangka pengelolaan PAD di Kabupaten Parigi Moutong di masa mendatang. Selain itu, artikel ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi artikel selanjutnya terkait dengan topik yang sama dengan artikel ini.

**Kata kunci:** Pendapatan Asli Daerah; Analisis Horisontal dan Vertikal

## **1. PENDAHULUAN**

Isu kemiskinan adalah masalah terbesar dalam suatu negara. Tingkat kemiskinan yang tinggi berbanding lurus dengan tingkat kriminalitas dalam sebuah negara. Di Indonesia, isu tersebutlah yang menjadi salah satu hakikat dari diterbitkannya Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU No 33 tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebut pula dengan nama UU Otonomi Daerah. Misinya adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang merata dan adil bagi seluruh rakyat. Otonomi daerah diartikan sebagai pelimpahan kekuasaan dan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola sendiri daerahnya. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah dianggap paling mengetahui dan memahami potensi dan kebutuhan masyarakat di daerahnya.

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong adalah sector pelayanan public daerah yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri, sejak diterbitkannya UU tentang Otonomi Daerah tersebut. Akan tetapi, tingkat kemiskinan di daerah tersebut masih tinggi. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa rata-rata persentase tingkat kemiskinan Kabupaten Parigi Moutong selama tahun 2013-2017 sebesar 17,46%, berada diatas rata-rata regional yang hanya sebesar 14,22%, dan nasional hanya sebesar 10,97% (lihat, lampiran I). Fakta tersebut menginformasikan bahwa kebijakan otonomi daerah tidak serta merta berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan di suatu daerah. Apakah dengan fakta itu, dapat kita disimpulkan bahwa kebijakan otonomi daerah itu salah? Tidak mesti demikian, karena bisa jadi kebijakannya sudah tepat, tetapi pemerintah daerah yang belum maksimal dalam mengimplementasikannya. Hal ini memungkinkan karena konsep otonomi daerah, memang menitikberatkan pada peran pemerintah daerah dalam membangun daerahnya.

Lobao, Jeanty, Partridge, & Kraybill, (2012) mengemukakan bahwa pemerintah daerah memiliki peran besar dalam pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan melalui kapasitas yang mereka miliki salah satunya adalah pendapatan asli daerah (PAD). Daerah dengan pendapatan yang berasal dari sumber daerah yang tinggi memiliki kecenderungan dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya dan lebih mampu membiayai program yang lebih banyak (Lindaman et al., 2016; Guess & Guess, 2016). Lebih lanjut, Lindaman et al., (2016) dan Lobao et al., (2012) juga berpendapat bahwa PAD sebagai gambaran desentralisasi fiskal memiliki pengaruh positif yang kuat untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatkan kualitas pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Artinya, PAD merupakan cerminan kapasitas pemerintah daerah dalam mengsejahterahkan masyarakatnya.

Sudah banyak penelitian yang membuktikan PAD berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Diantaranya, penelitian Lindaman et al., (2016) desentralisasi fiskal dalam hal pendapatan asli daerah memiliki efek positif yang kuat pada kebutuhan dasar. Faridi (2011) menunjukkan pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Di Pakistan. Abdillah & Mursinto

(2016) juga menemukan PAD berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Begitupula, (Silas, Wawire, & Okelo, 2018) juga menemukan PAD menurunkan kemiskinan di Kenya. Namun, penelitian yang mengungkap secara mendalam terkait dengan komponen PAD, masih sedikit dilakukan. Padahal itu penting, bagi pengambil kebijakan dan pihak terkait untuk mengevaluasi capaian pemerintah daerah mengoptimalkan potensi pendanaan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mengingat pentingnya PAD, sebagai salah satu sumber pendapatan daerah untuk membiayai belanja daerah dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Berangkat dari hal tersebut, maka penelitian ini hadir untuk mengevaluasi perkembangan dan kontribusi dari setiap komponen PAD. Hal ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran terkait dengan hasil pengelolaan PAD di masa lalu, sehingga dapat dijadikan dasar evaluasi bagi pihak pengambil keputusan dalam rangka pengelolaan (peningkatan) PAD di masa mendatang.

## **2. METODE PENELITIAN**

### **2.1. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data pendukung berupa penjelasan secara deskriptif terkait dengan data kuantitatif. Data kuantitatif adalah berbagai jenis data yang disajikan dalam format laporan pendapatan asli daerah (PAD) ataupun hasil olahan data dalam bentuk angka-angka.

Data penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian baik melalui pengamatan langsung maupun melalui wawancara pejabat terkait. Data sekunder adalah data yang telah ada pada obyek penelitian (data pendapatan asli daerah (PAD) beserta komponennya selama tahun 2013-2014) atau data hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini.

### **2.2. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data penelitian ini menggunakan beberapa metode antara lain: Metode observasi dimana mengamati dan meneliti segala sesuatu yang terkait dengan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini dilakukan untuk mengetahui gambaran umum terkait dengan Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Parigi Moutong.

Metode Wawancara dimana mengadakan wawancara secara langsung dengan pejabat pemerintah daerah terkait dengan penerimaan daerah dari sumber pendapatan asli daerah (PAD). Informasi terkait dengan sumber-sumber PAD, didapatkan dari Kepala BPKAD Kabupaten Parigi Moutong. Metode dokumentasi dilakukan dengan melakukan penelusuran terhadap laporan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Parigi Moutong selama tahun 2013-2017.

### 2.3. Definisi Operasional

Pendapatan Asli Daerah dasarnya merupakan penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan lain-lain yang sah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan di Kabupaten Parigi Moutong yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Retribusi Daerah dasarnya merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa dan atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan di Kabupaten Parigi Moutong

Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah Yang Dipisahkan merupakan bagian laba yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN, dan atas penyertaan pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah Lainnya Yang Sah merupakan penerimaan daerah Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

### 2.4. Metode Analisis

Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan melakukan analisis horisontal (tren) dan analisis vertikal. Analisis horisontal atau analisis tren, digunakan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan masing-masing jenis pendapatan asli daerah (PAD) dalam suatu periode, formulanya adalah sebagai berikut:

$$\Delta X_i = \frac{X_{it} - X_{it(t-1)}}{X_{it(t-1)}} \times 100\% \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

$\Delta X_i$  : Rasio pertumbuhan jenis PAD

$X_{it}$  : Jumlah jenis PAD tahun ke td

$X_{it(t-1)}$  : Jumlah jenis PAD tahun ke t-1

Sementara itu, analisis vertikal dilakukan untuk mengetahui kontribusi setiap komponen masing-masing jenis PAD dalam periode, formula perhitungannya adalah sebagai berikut.

$$\Delta X_i = \frac{X_i}{X} \times 100\% \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan :

$\Delta X_i$  : Rasio kontribusi jenis PAD

$X_i$  : Total PAD

Selanjutnya, setelah diketahui masing-masing nilai perubahan kenaikan dan penurunan, serta kontribusi setiap komponen maupun komposisi dari PAD. Kemudian, kedua dilakukan perhitungan untuk mencari nilai rata-rata PAD dan komposisinya. Tahap terakhir dilakukan analisis berdasarkan kategori yang telah ditetapkan pada tabel 1 dan 2 di bawah ini. Kedua tabel tersebut diadaptasi dari penelitian sebelumnya lihat (Sartika, Ulfa, & Ilyas, 2019)

Tabel 1. Tingkat Kategori Perubahan (Kenaikan/Penurunan) PAD

Peringkat Perubahan (Persentase)	Kategori
85% - 100%	Sangat Berhasil
70% - 85%	Berhasil
55% - 70%	Cukup Berhasil
30% - 55%	Kurang Berhasil
< 30%	Tidak Berhasil

Sumber: Halim dalam Sartika, et. al. (2018)

Tabel 2. Tingkat Kategori Kontribusi Komponen PAD

Derajat Kontribusi (Persentase)	Kategori
>50%	Sangat Baik
40% - 50%	Baik
30% - 40%	Sedang
20% - 30%	Cukup Baik
10% - 20%	Kurang Baik
<10%	Sangat Kurang Baik

Sumber: Halim dalam Sartika, et. al. (2018)

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Hasil Analisis Horisontal dan Vertikal

Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) didasarkan pada sumber PAD, yakni pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, seperti yang terlihat pada tabel 3 berikut ini.

Tabel. 3 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Parigi Moutong Selama Tahun 2013-2017

	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>33,616,226,838</b>	<b>76,559,870,442</b>	<b>77,837,915,697</b>	<b>91,176,502,631</b>	<b>153,873,011,873</b>
Pajak Daerah	5,084,311,249	8,377,387,833	9,639,698,472	13,983,718,534	15,740,486,617
Retribusi Daerah	19,961,653,111	6,394,679,374	5,125,825,264	6,496,120,792	7,609,113,363
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2,028,684,156	1,678,824,710	1,612,936,081	1,801,019,167	1,322,911,029
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6,541,578,322	60,108,978,525	61,459,455,880	68,895,644,138	129,200,500,864

Sumber: Data diolah dari BPKAD Kab. Parigi Moutong, 2018

Pada tabel 3 di atas tercermin bahwa secara umum perkembangan PAD yang cukup stabil dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, terlihat pada tahun 2013 realisasi PAD sebesar Rp 33.616.22.838,00, dan pada tahun 2017 realisasi PAD tumbuh menjadi Rp153.873.011,873,00. Hanya saja, perkembangan dan kontribusi dari setiap komponen PAD tersebut, tidak dapat diidentifikasi maupun dievaluasi secara langsung dengan melihat data pada tabel tersebut. Dengan demikian, masing-masing sumber PAD tersebut kemudian dievaluasi dengan menggunakan analisis horisontal dan analisis vertikal.

## Pajak Daerah

Hasil evaluasi pajak daerah yang dilakukan dengan menggunakan analisis horisontal dan analisis vertikal ditampilkan pada Tabel 4 dan 5 di bawah ini. Hasil analisis pada tabel 4 tersebut menunjukkan perkembangan komposisi pajak daerah Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong tertinggi yaitu pajak restoran rata-rata sebesar 271,86%, dan terendah rata-rata sebesar 10,35% yaitu pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan 0,00 pajak sarang burung walet, namun untuk pajak tersebut belum diperhitungkan karena memang belum dilakukan pemungutan pajak selama tahun 2014-2017. Dari tabel tersebut juga diketahui bahwa hanya pajak hotel dan pajak restoran yang perkembangannya berada di atas nilai rata-rata.

Tabel 4. Hasil Analisis Horisontal Pajak Daerah

Komposisi Pajak Daerah	Tahun				Rerata
	2014	2015	2016	2017	
Pajak Hotel	99.30	20.99	734.59	-25.96	207.23
Pajak Restoran	94.53	184.78	817.16	-9.05	271.86
Pajak Hiburan	11.65	-22.72	84.04	51.02	31.00
Pajak Reklame	-16.52	9.93	187.16	15.04	48.90
Pajak Penerangan Jalan	16.96	12.31	8.09	28.77	16.53
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	13.30	4.76	167.36	-4.95	45.12
Pajak Sarang Burung Walet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkota	0.00	20.91	12.11	8.37	10.35
Bea Perlehan Hak atas Tanah dan Bangunan	157.75	12.78	-42.31	173.58	75.45
<b>Rerata</b>	41.89	27.08	218.69	26.31	78.49

Sumber: Data diolah dari BPKAD Kab. Parigi Moutong, 2018

Sementara itu, hasil analisis vertikal pada tabel 5 di bawah ini memperlihatkan kontribusi setiap komposisi pajak daerah Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong selama tahun 2013-2017. Hasil analisis tersebut mencerminkan kontribusi masing-masing komposisi pajak daerah sebesar 11,11%, rata-rata tertinggi sebesar 55,40% yaitu pajak penerangan jalan, dan rata-rata terendah sebesar 0,17% yaitu pajak hiburan. Tabel tersebut juga memberitahukan bahwa terdapat 3 komponen pajak daerah yang berkontribusi terhadap pajak daerah di atas nilai rata-rata 11,11% yaitu pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan pajak mineral bukan logam dan batuan.

Tabel 5. Hasil Analisis Vertikal Pajak Daerah

Komposisi Pajak Daerah	Tahun					Rerata
	2013	2014	2015	2016	2017	
Pajak Hotel	0.50	0.61	0.64	3.69	2.43	1.57
Pajak Restoran	0.59	0.70	1.72	10.89	8.80	4.54
Pajak Hiburan	0.25	0.17	0.11	0.14	0.19	0.17
Pajak Reklame	2.15	1.09	1.04	2.06	2.11	1.69
Pajak Penerangan Jalan	78.93	56.03	54.69	40.75	46.61	55.40
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	16.28	11.20	10.19	18.79	15.87	14.47
Pajak Sarang Burung Walet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.01
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkota	0.00	28.19	29.63	22.90	22.04	20.55
Bea Perlehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.29	2.02	1.98	0.79	1.91	1.59

Sumber: Data diolah dari BPKAD Kab. Parigi Moutong, 2018

Dari hasil analisis table diatas menunjukkan bahwa 3 (tiga) komposisi pajak daerah dengan nilai rerata tertinggi berasal dari pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta pajak mineral bukan logam dan batuan

#### Retribusi Daerah

Tabel 6 dan 7 di bawah ini adalah hasil evaluasi yang dilakukan terhadap komposisi retribusi daerah dengan menggunakan analisis horisontal dan analisis vertikal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong selama tahun 2013-2017. Analisis horisontal pada tabel 6 tersebut memperlihatkan bahwa retribusi perizinan tertentu merupakan komposisi retribusi daerah yang mengalami perkembangan secara rata-rata tertinggi sebesar 10,12%, retribusi daerah jasa umum memiliki nilai rata-rata terendah sebesar -11,18%.

Tabel 6. Hasil Analisis Horisontal Retribusi Daerah

Komposisi Retribusi Daerah	Tahun				Rerata
	2014	2015	2016	2017	
Retribusi Jasa Umum	-70.47	-19.22	23.84	21.13	-11.18
Retribusi Jasa Usaha	-11.22	1.92	17.92	-16.31	-1.92
Retribusi Perizinan Tertentu	-22.95	-50.73	113.61	0.56	10.12
<b>Rerata</b>	<b>-34.88</b>	<b>-22.68</b>	<b>51.79</b>	<b>1.80</b>	<b>-0.99</b>

Sumber: Data diolah dari BPKAD Kab. Parigi Moutong, 2018

Dari tabel tersebut juga dilihat bahwa rata-rata komposisi retribusi daerah mengalami perubahan (penurunan) sebesar -09,99%.

Selanjutnya, tabel 7 di bawah ini menginformasikan bahwa rata-rata kontribusi setiap komposisi retribusi daerah terhadap retribusi daerah sebesar 33,58%, rata-rata tertinggi retribusi jasa umum sebesar 89,50%, dan rata-rata terendah retribusi perizinan tertentu sebesar 4,80%. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa kontribusi retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu terhadap retribusi daerah masih berada dibawah nilai rata-rata.

Tabel 7. Hasil Analisis Vertikal Retribusi Daerah

Komposisi Retribusi Daerah	Tahun					Rerata
	2013	2014	2015	2016	2017	
Retribusi Jasa Umum	95,27	87,82	88,50	86,49	89,44	89,50
Retribusi Jasa Usaha	2,31	6,95	8,77	8,35	5,77	6,43
Retribusi Perizinan Tertentu	2,52	6,07	3,73	6,29	5,40	4,80

Sumber: Data diolah dari BPKAD Kab. Parigi Moutong, 2018

Berdasarkan table 7 diatas menunjukkan bahwa retribusi jasa umum merupakan retribusi daerah yang memiliki rerata paling tinggi diantara retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

#### Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Tabel 8 di bawah ini menunjukkan hasil evaluasi atas komposisi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan melalui analisis horisontal dan analisis vertikal Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2013-2014. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa rata-rata tingkat penurunan komposisi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar -4,45%, tertinggi pada komponen bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD sebesar 16,01% dan terendah pada komponen pendapatan UPTD AM Dinas PU sebesar -18,91%.

Tabel 8. Hasil Analisis Horisontal Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan

Komposisi Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	Tahun				Rerata
	2014	2015	2016	2017	
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD	-42,38	121,31	11,66	-26,55	16,01
Pendapatan UPTD AM Dinas PU	24,37	-100,00	0,00	0,00	-18,91
<b>Rerata</b>	<b>-9,01</b>	<b>10,65</b>	<b>5,83</b>	<b>-13,27</b>	<b>-1,45</b>

Sumber: Data diolah dari BPKAD Kab. Parigi Moutong, 2018

Sementara itu, tabel 9 di bawah ini menyajikan kontribusi setiap komposisi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap penerimaan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong selama tahun 2013-2017. Dari analisis vertikal pada tabel tersebut menunjukkan rata-rata kontribusi setiap komposisi pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar -1,45%. Bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD memiliki nilai rata-rata kontribusi tertinggi, yaitu sebesar 16,01%, dan pendapatan UPTD AM dinas PU memiliki nilai rata-rata kontribusi terendah, yaitu sebesar -18,91% terhadap pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lebih lanjut, diketahui dari tabel tersebut bahwa pendapatan UPTD AM dinas PU masih memiliki kontribusi di bawah nilai rata-rata.

Tabel 9. Hasil Analisis Vertikal Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan

Komposisi Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	Tahun					Rerata
	2013	2014	2015	2016	2017	
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD	62,35	43,41	100,00	100,00	100,00	81,15
Pendapatan UPTD AM Dinas PU	37,65	56,59	0,00	0,00	0,00	18,85

Sumber: Data diolah dari BPKAD Kab. Parigi Moutong, 2018

Berdasarkan tabel di atas bahwa rerata untuk bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD jauh tinggi nilainya dibandingkan dengan rerata pendapatan UPTD AM Dinas PU.

#### Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Tabel 10 dan 11 berikut ini memperlihatkan hasil evaluasi atas komposisi lain-lain pendapatan asli daerah melalui analisis horisontal dan analisis vertikal pada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong selama tahun 2013-2014. Dari analisis horisontal pada tabel 10 tersebut menunjukkan bahwa perubahan komposisi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah secara rata-rata adalah sebesar -34,47%, nilai rata-rata tertinggi adalah pendapatan denda pajak reklame sebesar 1054,73%, dan untuk rata-rata terendah adalah hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan sebesar -35,12%. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa hanya pajak reklame yang memiliki perkembangan yang cukup signifikan di atas nilai rata-rata.



Tabel 10. Hasil Analisis Horizontal Lain-lain PAD yang Sah

Komposisi Lain-lain PAD yang Sah	Tahun				Rerata
	2014	2015	2016	2017	
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	-37,07	-31,52	-30,73	-41,18	-35,12
Penerimaan Jasa Giro	40,67	14,35	16,10	-24,69	11,61
Penerimaan Bungan Deposito	-100,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-33,39	4,01	59,27	-18,55	2,83
Pendapatan Denda Keterlambatan Pel. Pekerjaan	-18,42	-48,55	-41,46	70,59	-9,46
Pendapatan dan Pengembalian	58,08	-38,82	12,01	3,85	8,78
Pendapatan BLUD	0,00	-2,67	34,00	-0,17	7,79
Pendapatan Dana JKN	0,00	62,49	13,54	6,38	20,60
Pendapatan Operasional Operasional Sekolah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame	4134,06	75,96	55,60	-46,71	1054,73
Pendapatan Kurang Salur Tahun Sebelumnya	0,00	-25,18	-100,00	0,00	-31,30
Pendapatan dan SPAM	0,00	0,00	-63,28	-74,61	-34,47
<b>Rerata</b>	<b>336,99</b>	<b>0,84</b>	<b>-3,75</b>	<b>-10,42</b>	<b>80,92</b>

Sumber: Data diolah dari BPKAD Kab. Parigi Moutong, 2018

Lain halnya pada tabel 11 di bawah ini menunjukkan kontribusi setiap komposisi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong selama tahun 2013-2017. Berdasarkan analisis vertikal pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata kontribusi setiap komposisi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 8,33%, tingkat kontribusi tertinggi terhadap lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah dari pendapatan BLUD sebesar 42,97%, dan tingkat kontribusi terendah adalah dari pendapatan denda pajak reklame sebesar 0,08%. Dari tabel tersebut juga dapat diketahui bahwa penerimaan jasa giro, pendapatan dan pengembalian, pendapatan BLUD, dan pendapatan dan JKN menduduki kontribusi di atas rata-rata terhadap lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Tabel 11. Hasil Analisis Vertikal Lain-lain PAD yang Sah

Komposisi Lain-lain PAD yang Sah	Tahun					Rerata
	2013	2014	2015	2016	2017	
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	1,74	0,12	0,08	0,05	0,02	0,40
Penerimaan Jasa Giro	38,14	5,84	6,53	6,76	2,72	12,00
Penerimaan Bungan Deposito	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1,00	0,07	0,07	0,10	0,05	0,26
Pendapatan Denda Keterlambatan Pel. Pekerjaan	14,36	1,27	0,64	0,34	0,30	3,38
Pendapatan dan Pengembalian	43,17	7,43	4,44	4,44	2,46	12,39
Pendapatan BLUD	0,00	58,14	55,34	66,15	35,21	42,97
Pendapatan Dana JKN	0,00	13,36	21,23	21,51	12,20	13,66
Pendapatan Operasional Operasional Sekolah	0,00	0,00	0,00	0,00	46,94	9,39
Pendapatan Denda Pajak Reklame	0,01	0,06	0,11	0,15	0,04	0,08
Pendapatan Kurang Salur Tahun Sebelumnya	0,00	13,71	10,03	0,00	0,00	4,75
Pendapatan dan SPAM	0,00	0,00	1,52	0,50	0,07	0,42

Sumber: Data diolah dari BPKAD Kab. Parigi Moutong, 2018

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada tabel 12 dan 13 berikut ini menggambarkan hasil evaluasi secara keseluruhan dari perkembangan maupun kontribusi setiap komposisi pendapatan asli daerah pada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong selama tahun 2013-2017. Melalui analisis horisontal pada tabel 12 tersebut didapatkan informasi bahwa pertumbuhan rata-rata setiap komposisi dari pendapatan asli daerah sebesar 61,14%. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menduduki nilai rata-rata pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 230,19%, dan retribusi daerah berada pada kedudukan pertumbuhan terendah yaitu sebesar -10,99%. Dari analisis horisontal pada tabel tersebut juga diketahui bahwa hanya lain-lain pendapatan daerah yang sah yang memiliki nilai pertumbuhan di atas nilai rata-rata selama tahun 2014-2017.

Tabel 12. Hasil Analisis Horisontal PAD

Komponen PAD	Tahun				Rerata
	2014	2015	2016	2017	
Pajak Daerah	64,77	15,07	45,06	12,56	34,37
Retribusi Daerah	-67,97	-19,84	26,73	17,13	-10,99
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-17,25	-3,92	11,66	-26,55	-9,01
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	818,88	2,25	12,10	87,53	230,19
<b>Rerata</b>	199,61	-1,61	23,89	22,67	61,14

Sumber: Data diolah dari BPKAD Kab. Parigi Moutong, 2018

Selain itu, lebih jauh pada tabel 12 tersebut juga memperlihatkan perubahan penerimaan pajak Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong selama tahun 2014-2017. Dari tabel itu tergambar bahwa pada tahun 2014 penerimaan pajak daerah yaitu sebesar 64,77%, kemudian pada tahun 2015 turun menjadi 15,07%, lalu pada tahun 2016 kembali naik menjadi 45,06% akan tetapi tidak melampaui perolehan pajak pada tahun 2014. Sementara itu, pada tahun 2017 kembali turun menjadi 12,56%. Dari gambar tersebut dapat pula dilihat bahwa rata-rata perkembangan penerimaan pajak daerah adalah sebesar 34,37%. Selanjutnya, Dari tabel tersebut diatas juga mengindikasikan perubahan (kenaikan/ penurunan) penerimaan retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong selama tahun 2014-2017. Tabel tersebut dapat dinyatakan bahwa pada tahun 2014 terjadi perubahan (penurunan) penerimaan dari retribusi daerah yaitu sebesar -67,97%. Kembali pada tahun 2015 juga mengalami perubahan (penurunan) sebesar -19,84%. Kemudian pada tahun 2016 mengalami perkembangan penerimaan retribusi daerah menjadi 26,73%. Pada tahun 2017 juga mengalami perkembangan tetapi tidak sebesar pada tahun 2016, yaitu sebesar 17,13%. Sementara itu, rata-rata perubahan (penurunan) retribusi daerah sebesar -10,99%.

Pada tabel 12 di atas juga menampilkan perubahan (kenaikan/ penurunan) penerimaan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong selama tahun 2014-2017. Dari tabel tersebut dapat diuraikan bahwa tingkat penerimaan pengelolaan kekayaan daerah pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar -17,25%. Kemudian pada tahun 2015 juga mengalami penurunan sebesar -3,92%. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2016 penerimaan pengelolaan kekayaan daerah mengalami peningkatan sebesar 11,66%. Akan tetapi pada tahun berikutnya, yaitu

pada tahun 2017 kembali mengalami penurunan sebesar -26,55%. Gambar tersebut pula menyampaikan bahwa rerata penerimaan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami penurunan sebesar -9,01%. Tabel 18 di atas pula memperlihatkan perubahan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong selama tahun 2014-2017. Dari tabel tersebut terlihat bahwa penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 818,88%. Selanjutnya, pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 2,25%. Kemudian pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 12,10%. Sementara itu, pada tahun 2017 kembali mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 87,53%. Dari gambar tersebut pula terlihat bahwa rata-rata perubahan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 230,19%.

Sementara itu, pada tabel 13 di bawah ini melalui analisis vertikal juga menggambarkan kontribusi dari setiap komposisi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan asli daerah pada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong selama tahun 2013-2017. Dari hasil analisis dari tabel tersebut dapat dinyatakan bahwa kontribusi setiap komposisi pendapatan asli daerah secara rata-rata sebesar 25,00%. Sementara itu, lain-lain pendapatan daerah yang sah memiliki kontribusi terhadap pendapatan asli daerah tertinggi sebesar 67,29%, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memiliki kontribusi terendah sebesar 2,63% terhadap pendapatan asli daerah. Tabel itu, juga mengindikasikan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan masih berkontribusi di bawah nilai rata-rata.

Tabel 13. Hasil Analisis Vertikal PAD

Komponen PAD	Tahun					Rerata
	2013	2014	2015	2016	2017	
Pajak Daerah	15,12	10,94	12,38	15,34	10,23	12,80
Retribusi Daerah	59,38	8,35	6,59	7,12	4,95	17,28
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,03	2,19	2,07	1,98	0,86	2,63
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	19,46	78,51	78,96	75,56	83,97	67,29

Sumber: Data diolah dari BPKAD Kab. Parigi Moutong, 2018

### 3.2 Tingkat Kualifikasi Pertumbuhan dan Kontribusi Masing-Masing Komponen PAD

Melihat pada tabel 14 di bawah ini juga dapat diketahui tingkat kualifikasi pertumbuhan dan kontribusi komponen PAD terhadap PAD Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong selama tahun 2013-2017. Tabel tersebut menginformasikan bahwa rata-rata tingkat pertumbuhan pajak daerah termasuk dalam kualifikasi kurang berhasil dan tingkat kontribusinya termasuk dalam kualifikasi kurang baik. Tingkat pertumbuhan daerah termasuk dalam kualifikasi tidak berhasil dan kontribusinya terhadap PAD termasuk dalam kualifikasi kurang baik. Tingkat pertumbuhan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tergolong dalam kualifikasi tidak berhasil dan kontribusinya terhadap PAD termasuk dalam kualifikasi sangat kurang baik. Terakhir, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah termasuk dalam kualifikasi sangat berhasil dan kontribusinya terhadap PAD termasuk dalam tergolong dalam kualifikasi sangat baik. Lebih lanjut terkait pertumbuhan dan kontribusi dari masing-masing jenis PAD dapat dilihat pada tabel 13 berikut ini.

Tabel 14. Tingkat Kualifikasi Komponen PAD

Komponen PAD	Rerata Pertumbuhan	Kualifikasi	Rerata Kontribusi	Kualifikasi
<b>Pajak Daerah</b>	34,37	Kurang Berhasil	12,80	Kurang Baik
Pajak Hotel	207,23	Sangat Berhasil	1,57	Sangat Kurang Baik
Pajak Restoran	271,86	Sangat Berhasil	4,54	Sangat Kurang Baik
Pajak Hiburan	31,00	Kurang Berhasil	0,17	Sangat Kurang Baik
Pajak Reklame	48,90	Kurang Berhasil	1,69	Sangat Kurang Baik
Pajak Penerangan Jalan	16,53	Tidak Berhasil	55,40	Sangat Baik
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	45,12	Kurang Berhasil	14,47	Kurang Baik
Pajak Sarang Burung Walet	0,00	Tidak Berhasil	0,01	Sangat Kurang Baik
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	10,35	Tidak Berhasil	20,55	Cukup Baik
Bea Perlehan Hak atas Tanah dan Bangunan	75,45	Berhasil	1,59	Sangat Kurang Baik
<b>Retribusi Daerah</b>	-10,99	Tidak Berhasil	17,28	Kurang Baik
Retribusi Jasa Umum	-11,18	Tidak Berhasil	89,50	Sangat Baik
Retribusi Jasa Usaha	-1,92	Tidak Berhasil	6,43	Sangat Kurang Baik
Retribusi Perizinan Tertentu	10,12	Tidak Berhasil	4,80	Sangat Kurang Baik
<b>Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	-9,01	Tidak Berhasil	2,63	Sangat Kurang Baik
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD	16,01	Tidak Berhasil	81,15	Sangat Baik
Pendapatan UPTD AM Dinas PU	-18,91	Tidak Berhasil	18,85	Kurang Baik
<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	230,19	Sangat Berhasil	67,29	Sangat Baik
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	-35,12	Tidak Berhasil	0,40	Sangat Kurang Baik
Penerimaan Jasa Giro	11,61	Tidak Berhasil	12,00	Kurang Baik
Penerimaan Bunga Deposito	-25,00	Tidak Berhasil	0,32	Sangat Kurang Baik
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2,83	Tidak Berhasil	0,26	Sangat Kurang Baik
Pendapatan Denda Keterlambatan Pel. Pekerjaan	-9,46	Tidak Berhasil	3,38	Sangat Kurang Baik
Pendapatan dan Pengembalian	8,78	Tidak Berhasil	12,39	Kurang Baik
Pendapatan BLUD	7,79	Tidak Berhasil	42,97	Baik
Pendapatan Dana JKN	20,60	Tidak Berhasil	13,66	Kurang Baik
Pendapatan Operasional Operasional Sekolah	0,00	Tidak Berhasil	9,39	Sangat Kurang Baik
Pendapatan Denda Pajak Reklame	1054,73	Sangat Berhasil	0,08	Sangat Kurang Baik
Pendapatan Kurang Salur Tahun Sebelumnya	-31,30	Tidak Berhasil	4,75	Sangat Kurang Baik
Pendapatan dan SPAM	-34,47	Tidak Berhasil	0,42	Sangat Kurang Baik

Sumber: Data diolah dari BPKAD Kab. Parigi Moutong, 2018

Dari table diatas menunjukkan bahwa kualifikasi komponen PAD yang sangat baik terdiri atas 3 (tiga) komponen PAD yaitu : retribusi jasa umum (89,50), bagian laba atas penyerataan modal pada BUMD (81,15), dan pajak penerangan jalan (55,40)

### 3.3 Pembahasan

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah salah satu wujud otonomi daerah yang memberikan keleluasaan bagi kepala daerah untuk mengoptimalkan pontensi pendanaan daerah dalam otonomi daerah. Dengan kata lain, PAD mempresentasikan hasil usaha pemerintah daerah dalam mengelola potensi daerahnya. PAD menjadi salah satu sumber pendapatan yang dapat digunakan daerah untuk membiayai segala bentuk belanja daerah. PAD yang besar memberikan kepercayaan diri bagi daerah untuk menetapkan belanja daerah sebesar-besarnya

dalam memberikan pelayanan publik. Pemanfaatan pendapatan asli daerah secara optimal ditenggarai memberikan pengaruh positif terhadap realisasi program pemerintah daerah yang berguna untuk meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

PAD adalah penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan sumber ekonomi daerah asli. Komponen PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. UU Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan jenis pajak daerah kabupaten terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dari 11 jenis pajak tersebut, pada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. pajak restoran yang memiliki tingkat perkembangan yang paling tinggi (sangat berhasil). Sementara itu, pajak penerangan jalan memberikan derajat kontribusi tertinggi (sangat baik), meskipun tingkat perkembangannya rendah tetapi kontinyu (stabil) dari tahun ke tahun.

Menurut Kamaludin (2004) yang diikuti Harinoto, (2013) mengemukakan bahwa hasil pajak daerah dalam kaitannya dengan peningkatan pendapatan daerah, kebijaksanaan yang perlu ditempuh adalah intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak. Intensifikasi pajak daerah melalui peningkatan penerimaan komposisi pajak daerah yang ada atau yang sudah berjalan selama ini. Yaitu, dengan melakukan kegiatan penerangan, penyuluhan, dan sosialisasi secara langsung lewat seminar atau pertemuan, media cetak (koran, tabloit, baliho, spanduk, dan brosur), dan media online guna menggugah pemahaman masyarakat daerah untuk taat membayar pajak daerah. Sementara itu, ekstensifikasi pajak daerah melalui usaha mencari dan menggali sumber-sumber pajak daerah yang baru, tetapi tetap berada dalam batas ketentuan perundang-undangan.

Di dalam UU No. 28 tahun 2009 tertera bahwa retribusi daerah terdiri dari tiga bagian, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Dari ketiga jenis retribusi tersebut, pada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong ditemukan retribusi perizinan tertentu memiliki tingkat pertumbuhan yang kurang baik (tidak berhasil). Sementara itu, retribusi jasa umum yang mempunyai derajat kontribusi terbesar (sangat baik) terhadap retribusi daerah pada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.

Retribusi daerah pada dasarnya merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian fasilitas daerah atau memperoleh layanan jasa oleh pemerintah daerah. Artinya, semakin banyak layanan yang disediakan maupun yang diberikan pemerintah daerah akan semakin terbuka lebar bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan hasil dari pungutan retribusi daerah. Secara prinsipnya, retribusi daerah tidak berbeda jauh dengan pajak daerah. Demikian pula, dalam hal meningkatkan penerimaan daerah dari retribusi daerah. Usaha intensifikasi dan ekstensifikasi juga penting dilakukan untuk memperbesar jumlah rupiah yang diterima pemerintah daerah melalui retribusi daerah. Intensifikasi dilakukan dengan cara memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sehingga menarik minat masyarakat untuk menggunakan fasilitas maupun layanan yang diberikan kepada masyarakat. Yakin dan percaya, ketika masyarakat terlayani dengan baik, maka mereka akan memberikan imbalan yang

sependan tanpa perlu usaha keras untuk memintanya. Ekstensifikasi dilakukan dengan cara menyajikan dan memberikan layanan baru kepada masyarakat. Contohnya, membuka tempat olahraga, tempat wisata, ataupun penginapan/villa dan lain-lain yang diketahui dapat memberikan tambahan penerimaan daerah dari retribusi tersebut.

Sumber penerimaan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, yaitu bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, dan pendapatan UPTD AM Dinas PU. Dari kedua jenis, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD memiliki tingkat pertumbuhan rendah (tidak berhasil), Sementara itu, pendapatan UPTD AM Dinas PU memiliki derajat kontribusi sangat besar (sangat baik) terhadap penerimaan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Melihat Permendagri No. 59 tahun 2007, masih terdapat dua jenis pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang belum dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, yaitu bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Terdiri dari 12 jenis sumber penerimaan dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang dikelola Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, yaitu hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga deposito, tuntutan ganti kerugian daerah, pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan dan pengembalian, pendapatan BLUD, pendapatan dana JKN, pendapatan operasional sekolah, pendapatan denda pajak reklame, pendapatan kurang salur tahun sebelumnya, pendapatan dan SPAM. Dari 12 jenis lain-lain pendapatan tersebut pendapatan denda pajak reklame memiliki tingkat pertumbuhan yang sangat baik (sangat berhasil). Dan, pendapatan BLUD yang memiliki derajat kontribusi yang cukup besar (baik) terhadap pengelolaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Selengkapnya, terkait dengan komponen PAD Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong yang memiliki tingkat pertumbuhan tertinggi (sangat berhasil) adalah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, juga memiliki derajat kontribusi yang sangat besar (sangat baik). Hasil ini tentunya, mengisyaratkan bahwa Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong belum mengoptimalkan penerimaan daerah dari sumber pajak daerah dan retribusi daerah. Padahal, kedua sumber itu digadagadag sebagai sumber penerimaan daerah yang dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Artinya, pajak daerah dan retribusi daerah dalam kebijakan otonomi daerah dimaknai akan memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, selayaknya benar-benar menfokuskan gagasan untuk mengoptimalkan penerimaan PAD dari kedua sumber tersebut.

#### **4. PENUTUP**

Tulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi perkembangan dan kontribusi masing-masing komponen PAD Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong selama tahun 2013-2017. Analisis horisontal dan analisis vertikal dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mayoritas tingkat pertumbuhan masing-masing

komponen PAD masih rendah dan sangat fluktuatif, dan mayoritas tingkat kontribusi masing-masing komponen PAD juga masih kecil. Hasil temuan tersebut, diharapkan memberikan informasi tambahan bagi pengambil kebijakan terkait dengan pengelolaan PAD di masa mendatang. Lebihnya, temuan penelitian ini juga dapat dijadikan dasar bagi penelitian selanjutnya, yang tertarik untuk meneliti terkait dengan evaluasi PAD.

#### DAFTAR PUSTAKA

Artikel :

- Abdillah, K., & Mursinto, D. (2016). *The effects of fiscal decentralitation, economic growth and income inequality on poverty rate of Indonesia's 3 Provinces*. International Journal of Advanced Research, 4(2), 405–414.
- Faridi, M. Z. (2011). *Contribution of Fiscal Decentralization to Economic Growth: Evidence from Pakistan*. Pakistan Journal of Social Sciences (PJSS), 31(1), 1–13. Retrieved from <https://pdfs.semanticscholar.org/6d6e/cebffa39bd44fed6540b8cbf649ceeda255.pdf>
- Guess, G. M., & Guess, G. M. (2016). *Adjusting Fiscal Decentralization Programs to Improve Service Results in Bulgaria and Romania* Published by: Wiley on behalf of the American Society for Public Administration Stable URL : <http://www.jstor.org/stable/4624621> Linked references are available. 67(4), 731–744.
- Harinoto. (2013). *Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 2013*. (32), 28–44.
- Lindaman, K., Thurmaier, K., Development, S. E., Change, C., July, N., & Lindaman, K. (2016). *Beyond Efficiency and Economy: An Examination of Basic Needs and Fiscal Decentralization* Published by: The University of Chicago Press Stable URL : <http://www.jstor.org/stable/10.1086/342760> Beyond Efficiency and Economy : An Examination of Basic Needs . 50(4), 915–934.
- Lobao, L., Jeanty, P. W., Partridge, M., & Kraybill, D. (2012). *Poverty and Place across the United States: Do County Governments Matter to the Distribution of Economic Disparities?* <https://doi.org/10.1177/0160017611435356>
- Silas, M. P., Wawire, P. N. H. W., & Okelo, P. A. O. (2018). *Effects Of Fiscal Decentralization On Poverty Reduction in Kenya*. 6(01). Retrieved from <http://ijier.net/ijier/article/view/937>

Undang- Undang :

- \_\_\_\_\_. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah*.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 *tentang pajak daerah dan retribusi daerah*
- \_\_\_\_\_. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 *tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.